

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Arab Saudi atau yang dikenal dengan (Kingdom of Saudi Arabia/Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah) adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Timur Tengah. Negara ini merupakan negara dengan system monarki absolut yang terletak di Jazirah Arab. Abdul Aziz ibn Abdurrahman al-Sa'ud atau yang dikenal dengan sebutan Ibnu Sa'ud adalah orang yang memproklamasikan berdirinya Kerajaan Arab Saudi dengan menyatukan wilayah Riyadh, Najd (Nejed), Hail, Asir, dan Hijaz. Kemudian, Abdul Aziz menjadi raja pertama pada kerajaan tersebut. 23 September 1932 adalah hari dimana bersatunya kerajaan Arab Saudi yang pertama kali diperingati oleh raja pertama Arab Saudi yaitu Abdul Aziz bin ibn Abdurrahman Al-Saud.

Arab Saudi merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Teluk, Bahrain, Qatar dan Uni Emirat Arab (Abu-Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras Al-Khaimah, Fujairah, Umm Al-Qawain dan Ajman) pada bagian timur; Jordania, Iraq dan Kuwait pada bagian utara; dan Oman dan Yemen pada bagian Selatan; serta Laut Merah pada bagian Barat. Pada dasarnya, Arab Saudi adalah sebuah negara yang terbagi atas empat wilayah utama yaitu utara, timur, selatan dan barat. Namun, untuk mempermudah administrasi negara, Arab Saudi kini telah dibagi menjadi lima bagian atau wilayah yaitu, wilayah Timur (Al-Hasa), Barat (Hijaz), Selatan (Asir), Tengah (Najd), dan provinsi bagian Utara.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Fouad, Al-Farsy. 1986. *Saudi Arabia, A Case Study in Development*. London: John Wiley & Sons, Ltd. hlm. 28 diakses dari skripsi Asrin Dimas Trifathullah UNHAS pada 28 September 2018 : 21.30

**Gambar 1.1**  
**Peta Wilayah Arab Saudi**



**Gambar1.2**  
**Peta Pembagian Wilayah Arab Saudi**



*Sumber : [www.google.com](http://www.google.com)*

Dalam dunia hubungan internasional, hubungan diplomatik antar negara merupakan sebuah fenomena yang perlu dijalin oleh negara yang saling tergantung untuk mencapai pemenuhan kepentingan nasional dari negara

tersebut. Hubungan diplomatik ini menjadi suatu cara untuk menjembatani kepentingan setiap negara dalam hubungan internasional. Menjalin hubungan diplomatik dengan banyak negara adalah salah satu cara yang dilakukan Arab Saudi untuk mencapai kepentingan negaranya. Qatar adalah salah satu negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Arab Saudi.

Arab Saudi dan Qatar merupakan dua negara yang terletak pada kawasan teluk dan sama-sama tergabung dalam Dewan Kerjasama Teluk (*Gulf Cooperation Council*) yang dibentuk di Riyadh pada 25 Mei 1981. Dengan tujuan dasar untuk memiliki koordinasi, integrasi dan inter-koneksi antara negara anggota disemua bidang seperti ekonomi, perdagangan, pariwisata, beacukai, legislasi dan administrasi. GCC merupakan sebuah aliansi politik dan ekonomi enam negara Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Kuwait, UEA, Qatar, Bahrain dan Oman. Negara-negara GCC berusaha membangun kekuatan pertahanan mereka menurut konsep umum. Dalam konteks ini, mereka memiliki prosedur operasional, pelatihan, dan kurikulum militer yang terpadu. Mereka juga berusaha mencapai keserasian sistem militer mereka. Selain itu angkatan bersenjata Negara-negara GCC melakukan latihan militer bersama dengan Pasukan Perisai Semenanjung, serta manuver udara dan laut bersama.<sup>2</sup>

Hubungan Arab Saudi dan Qatar sejak tergabung ke dalam GCC ini berjalan cukup baik. Arab Saudi dan Qatar pernah berkomitmen dalam bidang keamanan kawasan melalui perjanjian keamanan yang dikenal dengan “Perjanjian Riyadh” yang juga ikut ditandatangani oleh Kuwait pada 23 November 2013. Perjanjian dalam dokumen pertama ini berisi komitmen negara-negara Arab untuk menghindari intervensi-

---

<sup>2</sup> GlobalSecurity, “*Gulf Cooperation Council*”, diakses dari <https://www.globalsecurity.org/military/world/gulf/gcc.htm>

intervensi urusan internal dari setiap negara dan tidak memberikan pembiayaan maupun dukungan politik terhadap suatu kelompok yang melakukan penyimpangan seperti halnya Ikhwanul Muslimin di Mesir dan kelompok oposisi di Yaman. Sedangkan pada perjanjian kedua, lebih menegaskan para pihak yang ikut menandatangani perjanjian untuk mendukung stabilitas Mesir dan mencegah Al Jazeera untuk dijadikan sebagai sarana oleh beberapa tokoh atau kelompok-kelompok yang mengadakan perlawanan menentang otoritas Mesir.

Qatar merupakan sebuah negara yang berdekatan secara geografis dengan Arab Saudi. Hal ini menjadi salah satu alasan Arab Saudi menjalin hubungan diplomatik dengan Qatar untuk menjembatani kepentingan negaranya. Arab Saudi dan Qatar memiliki hubungan diplomatik yang relatif flukuatif. Qatar memiliki hubungan yang baik dengan Arab Saudi dalam hal ekspor *Liquified Natural Gas* (LNG). LNG ini menjadikan Qatar menjaga hubungan internasionalnya agar tetap stabil dengan negara-negara Arab. Seperti yang dilansir Reuters, pada 6 Juni 2017, bahwa Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Mesir merupakan tiga negara yang sangat bergantung kepada gas Qatar, baik itu melalui pipa atau LNG.<sup>3</sup>

Selain kerjasama dalam hal ekspor LNG, Qatar juga memiliki peranan penting dalam mendukung Arab Spring yang terjadi di beberapa negara Arab, termasuk pula Arab Saudi. Filosofi yang dikenal ialah muslim brotherhood (tetangga muslim/rekan muslim), dimana isu pertama yang

---

<sup>3</sup>Anto Kurniawan dalam Arab Saudi Cs dan Qatar Putus Hubungan, *Pasar LNG Akan Terpengaruh*, diakses dari <https://ekbis.sindonews.com/read/1211212/35/arab-saudi-cs-dan-qatar-putus-hubungan-pasar-lng-akanterpengaruh-1496740667> pada 25 November 2018.

berhembus kencang ialah relasi antara Qatar dan Saudi/Uni Emirat Arab dengan *muslim brotherhood* dan pemberitaannya di beberapa organisasi di Doha selama beberapa dekade. Hal ini menjadi basis terjadinya pergolakan di Timur Tengah. Serta, kedekatan secara ras, bahasa, maupun agama menjadi energi terbesar Qatar dalam mendukung Arab Spring.<sup>4</sup>

Hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Qatar ini sudah berlangsung sejak lama. Dalam menjalin hubungan diplomatiknya, Saudi dan Qatar ini diwarnai dengan intensitas hubungan yang naik turun. Dimana, pada tahun 2017 lalu, dunia internasional digemparkan dengan adanya kabar Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Tepatnya pada 5 Juni 2017, Arab Saudi kembali memutuskan hubungan diplomatiknya terhadap Qatar. Dalam memutuskan hubungan diplomatik tersebut, Arab Saudi tidak sendirian tetapi juga diikuti lima negara Arab lainnya yang merupakan sekutu Arab Saudi di Timur Tengah, yaitu Yaman, Mesir, Bahrain, Libya dan Uni Emirat Arab.<sup>5</sup> Arab Saudi juga telah memutuskan semua hubungan darat, laut dan udara dengan Qatar. Pada saat itu warga Qatar diberi waktu selama 14 hari untuk meninggalkan Arab Saudi dan dua negara sekutu yaitu UAE dan Bahrain. Arab Saudi juga meminta para diplomat

---

<sup>4</sup> Sijekto, "MOTIVASI NEGARA DEWAN TELUK (ARAB SAUDI, UEA DAN BAHRAIN) MENARIK DUTA BESARNYA DI QATAR PADA TAHUN 2014" JOM FISIP Vol. 3 No. 1 – Februari 2016, Universitas Riau, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/32929-ID-motivasi-negara-dewan-teluk-arab-saudi-uea-dan-bahrain-menarik-duta-besarnya-di.pdf> pada 25 November 2018

<sup>5</sup> BBC.com "Krisis Qatar: Empat faktor kejengkelan tetangga Arab", BBC Indonesia 2017, pada 05 Oktober 2018. <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-40169036>

Qatar segera meninggalkan pos asing mereka dalam waktu 48 jam.<sup>6</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: **Mengapa Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada tahun 2017 ?**

## **C. Kerangka Teori**

### **1. Teori Politik Luar Negeri**

Secara umum, politik luar negeri bisa dikatakan sebagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara ataupun komunitas politik lainnya, dalam hubungan dengan negara dan aktor bukan negara dalam dunia internasional dan politik luar negeri ini menjembatani batas wilayah dalam negeri dan lingkungan internasional. Politik luar negeri bisa berupa hubungan diplomatik, mengeluarkan doktrin dan membuat aliansi serta mencanangkan tujuan jangka panjang maupun jangka pendek, seperti yang dikatakan J. Holsti.<sup>7</sup>

Politik luar negeri dari suatu negara dalam pandangan yang lebih luas, merupakan iringan kebijaksanaan disertai rentetan tindakan yang rumit, tetapi dinamis yang ditempuh oleh negara itu dalam hubungannya dengan negara-negara lain atau sebagai kegiatannya dalam organisasi-organisasi regional maupun internasional. Politik luar negeri bukan hanya jumlah dari kebijakan-kebijakan di bidang luar negeri saja, tetapi lebih dari itu ia juga mengandung kewajiban-kewajiban, tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan prinsip-prinsip

---

<sup>6</sup> Ibid, 05 Oktober 2018

<sup>7</sup> Eby Hara, Abubakar. 2011. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: Dari Realisme Sampai Konstruktivisme*. Bandung: Penerbit Nuansa, hlm.13

yang dianggap benar yang terdapat di belakang politik luar negeri tersebut.

Dalam mempelajari politik luar negeri, ada sebuah diktum yang berlaku universal berbunyi politik luar negeri selalu dilandasi oleh kepentingan nasional demi mencapai tujuan-tujuan nasional dari negara bangsanya (*nation state*). Seperti yang dikatakan Morgenthau dalam bukunya *Politics Among Nations*, bahwa tujuan nasional sebenarnya merupakan elaborasi kepentingan-kepentingan nasional negara bangsa tersebut. Dalil universal ini menunjukkan hubungan tidak terpisahkan antara politik luar negeri sebagai alat atau instrumen interaksi antar negara bangsa dalam politik internasional, selalu didorong dan dikendalikan oleh motivasi mencapai kepentingan nasional tertentu dan hubungan ini berlaku dalam tataran konseptual maupun empiris.

Morgenthau seorang pengikut realisme klasik, dia berbicara tentang tanggung jawab seorang pemimpin dan artinya, melihat pentingnya peranan individu dalam politik luar negeri. Dia juga mendiskusikan pentingnya karakter nasional sebagai suatu aspek kekuatan nasional yang mempengaruhi politik luar negeri. Holsti, yang juga digolongkan sebagai pengikut realisme klasik penerus Morgenthau, menyebutkan bahwa selain dipengaruhi oleh struktur sistem internasional, strategi umum domestik dan kebutuhan ekonomi seperti Morgenthau, ia juga menyebutkan peranan pembuat keputusan dalam mempersepsikan ancaman eksternal yang tetap terhadap nilai-nilai dan kepentingan mereka akan sangat menentukan orientasi politik luar negeri dari negara itu.<sup>8</sup> Dalam pandangan Holsti, negara sebagai aktor ini memiliki tujuan-tujuan, aspirasi, kebutuhan, sikap, pilihan dan tindakan politik luar negeri yang dipengaruhi atau

---

<sup>8</sup>Perwita, Anak Agung Banyu dkk.2014. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm 25.

terbentuk oleh struktur kekuatan dan distribusi kekuasaan dalam politik internasional.<sup>9</sup>

## 2. Konsep Keamanan

Secara etimologis, konsep keamanan (*security*) berasal dari bahasa latin yaitu, “*socurus*” yang berarti terbebas dari bahaya dan terbebas dari ketakutan. Kata ini juga bisa bermakna dari gabungan kata *se* yang mempunyai arti “*without*” (tanpa/tidak ada) dan “*curus*” yang memiliki arti “*uneasiness*” (kegelisahan/kondisi tidak tenang). Maka, pada dasarnya “*security*” memiliki makna terbebas dari rasa tidak tenang, atau sebuah situasi yang damai tanpa berbagai resiko ataupun ancaman.

Para ahli Hubungan Internasional dalam banyak literature berargumen bahwa, konsep keamanan merupakan sebuah “*contested concept*”. Dimana, pendekatan tradisional didominasi oleh mashab Realisme yang menyebutkan bahwa konsep keamanan merupakan sebuah kondisi yang terbebas dari berbagai ancaman militer dan juga kemampuan suatu negara untuk melindungi negara-bangsanya (*nation state*) terhadap serangan militer yang berasal dari lingkungan eksternal.<sup>10</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Walter Lippmann, menyatakan bahwa “*a nation is secure to the extent to which it is not in danger of having to sacrifice core values if it wishes to avoid war, and is able, if challenged, to maintain*

---

<sup>9</sup>Asrudin, Azwar. 2014. *Thomas Khun dan Teori Hubungan Internasional: Realisme sebagai Paradigma*, Indonesian Journal of International Studies Vol.1, Desember 2014.

<sup>10</sup> Helga Haftendorn (1991). *The Security Puzzle: Theory, Building and Discipline in International Security*. Dalam *International Studies Quarterly*. Vol,35. No.1.hlm.3-17.



*them by victory in such a war*".<sup>11</sup> Sedangkan Arnold Wolfers memaknai konsep keamanan yang lebih komprehensif yang kemudian menjadi standard dalam Teori Hubungan Internasional "*Security, in an objective sense, measures the absence of threats to acquired values, in a subjective sense, the absence of fear that such values will be attacked*".<sup>12</sup>

Beberapa contoh definisi keamanan di atas menunjukkan persamaan dalam hal kebebasan terhadap berbagai ancaman (militer), namun pernyataan di atas juga secara jelas terdapat perbedaan "*referent*" atau aktor keamanan (individual, nasional dan internasional). Konsep keamanan ditinjau secara tradisional, hanya merujuk pada sifat ancaman yang bersifat militer sehingga responnya pun bersifat militer dan hanya terfokus pada unit/aktor negara.

Sejalan dengan perkembangan-perkembangan dalam dunia hubungan internasional, Barry Buzan yang merupakan seorang tokoh penggerak pendekatan yang biasa disebut sebagai "*the widening School/the widerner*" memperluas makna konsep keamanan dengan argumentasi bahwa keamanan tidak hanya meliputi aspek militer dan aktor negara semata melainkan akan meliputi aspek-aspek non militer dengan melibatkan aktivitas aktor non-negara.<sup>13</sup> Dimana, keamanan yang lebih luas dan kompleks akan dipengaruhi oleh sector politik, ekonomi, societal dan lingkungan baik dari peringkat individu, nasional, regional maupun global.

---

<sup>11</sup> Dikutip dalam Baylis, John, Smith, Steve (2001). *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. Oxford: Oxford University Press. Hlm.255

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Buzan, Barry (1997). *Rethinking Security After the Cold War*. Dalam *Cooperation and Conflict: The Nordic Journal of International Studies*. Vol.32.No.1.hlm. 5-28.

Pada penelitian ini, penulis lebih menekankan alasan-alasan Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar menggunakan konsep keamanan melalui pendekatan realis. Dimana, Realisme sendiri merupakan sebuah tradisi teoritik yang mendominasi studi Hubungan Internasional pada masa Perang Dingin. Pendekatan teoritik ini, menggambarkan hubungan internasional sebagai suatu pergulatan memperebutkan kekuasaan diantara negara-negara yang masing-masing mengejar kepentingan nasionalnya dan umumnya pesimistik mengenai prospek upaya penghapusan konflik dan perang. Realisme mendominasi masa Perang Dingin, karena gagasan ini bisa memberi penjelasan yang sederhana dan cukup meyakinkan mengenai perang, aliansi, imperialisme, hambatan terhadap kerjasama dan berbagai fenomena internasional dan karena penekanannya pada kompetisi waktu itu sesuai dengan sifat pokok persaingan AS-Uni Soviet (US).

Menurut Waltz dan teoritisi neo-realis lain, tidak mengherankan kalau keamanan AS sangat terjamin selama masa Perang Dingin. Yang paling ditakutkan oleh ilmuwan neo-realis adalah kalau AS menyalah-gunakan posisi yang menguntungkan itu untuk menerapkan politik luar negeri yang terlalu agresif. Ini menunjukkan bahwa pada akhir masa Perang Dingin realisme tidak lagi diwarnai oleh konsepsi Morgenthau mengenai sifat manusia yang serba gelap dan pesimistik, tetapi menganut cara pandang yang lebih optimistik.

Pendekatan realis ini berasumsi berdasarkan pada pandangan anarki, *self help*, dan pemahaman aktor rasional dari negara. Realisme sendiri didasarkan pada suatu keadaan yang terjadi (realitas). Dengan demikian, realis mengklaim bahwa agar bisa bertahan negara harus bertindak sebagai pemaksimalan kekuatan. Menurut kaum realis, kebijakan luar negeri suatu negara sangat dipengaruhi oleh kondisi posisinya

dalam sistem internasional dan distribusi kekuasaan di dalamnya.<sup>14</sup>Inilah yang sering disebut dengan konsep 3S yaitu *statism, survival, self-helps*.

*State (statism)* atau *groupism* menurut pandangan realis merupakan aktor utama dalam Hubungan Internasional yang anarkis. Asumsi ini berasal dari kenyataan bahwa untuk *survive* dan mencapai level subsistem manusia perlu hidup bersatu berdasarkan suatu solidaritas kelompok. Negara sebagai satu komunitas politik yang independen, mempunyai kedaulatan terhadap suatu wilayah dalam dunia yang anarkis. Anarki bagi realis bukan keadaan benar-benar kacau dan tidak ada aturan, tetapi ketiadaan kekuasaan sentral. Berbeda dengan struktur organisasi dalam politik domestik yang hirarkis. Dalam hubungan internasional, struktur dasarnya adalah anarkis di mana negara-negara adalah berdaulat dan menganggap kekuasaan tertinggi ada di tangan mereka dan tidak mengenal kekuasaan lebih tinggi di atas mereka. *Survival* atau *egoism* menurut pandangan realis merupakan kecenderungan manusia untuk mengedepankan kepentingan diri sendiri (*self-interest/national-interests*) daripada orang lain maupun kelompok, dalam hubungan internasional konteks *survival* bisa diartikan di mana sebuah negara mengedepankan kepentingan negaranya masing-masing ketimbang kepentingan bersama. *Power-centrism* atau *self help* dalam pandangan realis merupakan kecenderungan utama lainnya yang dimiliki manusia untuk memberikan pengaruhnya maupun berkuasa serta mendapatkan sumber daya sehingga hasrat *egoism* atau *survival* dalam sebuah *group* atau *state* tetap terakomodasi.

Dalam hal ini, khususnya dalam konteks pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Qatar merupakan

---

<sup>14</sup>Olshiyama, Jhon. 2013. *Ilmu Politik: Dalam Paradigma Abad Ke-21 (jilid I)*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 555-556

*national interest* Arab Saudi dalam mempertahankan eksistensi Arab Saudi di wilayah Timur Tengah, dalam konteks internasional yang anarkis, pemutusan ini merupakan politik luar negeri Arab Saudi sebagai prioritas negara untuk menjaga kelangsungan hidupnya atau *survival* dari ancaman negara lain yang juga merupakan inti dari kepentingan nasional Arab Saudi. Menurut pandangan realis dalam hubungan internasional, setiap negara harus menolong dirinya sendiri atau *self help*. Negara tidak boleh percaya dengan negara lain atau organisasi internasional, tapi harus mencari cara sendiri terutama meningkatkan kekuatan militernya. Oleh sebab itu tindakan setiap negara dalam hubungan internasional dipengaruhi oleh *national interest* yang berorientasi pada keamanan (*power*) setiap negara.

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan analisa penulis menurut kerangka teori yang ada, Arab Saudi melakukan pemutusan hubungan diplomatik terhadap Qatar tahun 2017 disebabkan oleh faktor:

1. *Statism* : didukung oleh lima negara Arab lainnya yang merupakan sekutu Saudi di wilayah Timur Tengah, Saudi tetap menjadi negara yang kuat dalam hal mempertahankan eksistensinya
2. *Survival*: dipengaruhi oleh keinginan Saudi yang ingin mempertahankan eksistensinya di wilayah Timur Tengah

#### **E. Metodologi Penelitian**

##### **1. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penulis menggunakan studi analisa untuk menjelaskan permasalahan yang ada.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dan melakukan telaah studi pustaka (*Library Research*) dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, diantaranya:

- a. Buku
- b. Jurnal
- c. Majalah dan Koran
- d. Artikel

## **3. Metode Analisa**

Metode analisa dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisa kualitatif karena pada dasarnya data penelitian ini diambil dari data kualitatif. Data deskriptif dihasilkan melalui metode kualitatif sebagai prosedur penelitian berupa kata-kata tertulis maupun yang terucap dari pelaku yang diamati.

## **F. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan pada penelitian ini adalah pada batasan waktu berdasarkan dinamika hubungan diplomatik Arab Saudi dan Qatar yang dimulai pada Juli 2013, dimana Arab Saudi dan Qatar terlibat dalam konflik bilateral dikarenakan kebijakan Qatar menerima eksil Ikhwanul Muslimin yang diusir militer Mesir sampai akhirnya ia mengambil kebijakan untuk memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar, yang ditinjau dari konsep keamanan melalui pendekatan realis.

## **G. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Bab I** Pendahuluan yang berisi; latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metodologi penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penelitian.

**Bab II** yang akan membahas tentang tinjauan umum Arab Saudi, sistem pemerintahan Arab Saudi, sistem politik Arab Saudi, dinamika politik dalam dan luar negeri Arab Saudi

**Bab III** akan membahas tentang dinamika politik luar negeri Arab Saudi-Qatar

**Bab IV** faktor-faktor yang menjadi pendorong pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Qatar dengan menggunakan Konsep Keamanan melalui Pendekatan Realis

**Bab V** merupakan bab yang akan membahas tentang uraian kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.